

**DAMPAK KERUSUHAN MEI 1998 TERHADAP PERKEMBANGAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Tugas Ujian Akhir Semester

Disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester
mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
pada Program Studi Diploma III Teknik Informatika
Universitas Sebelas Maret



Disusun oleh:

SARI EKA NUR MARIFAH

M3119082

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH	1
BAB II	2
2.1 Hak Asasi Manusia (<i>Human Right</i>)	2
2.2 Kerusuhan Mei 1998.....	2
2.3 Krisis Keuangan Asia	3
2.4 Tragedi Trisakti.....	3
2.5 Penegakan HAM di Era Reformasi.....	3
BAB III.....	4
BAB IV.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman penduduknya, baik dari keberagaman agama, suku, ras, budaya, etnis, dan Bahasa. Keragaman ini menjadi tolak ukur suatu negara ini disebut menjadi negara majemuk. Tak luput dari kekayaan keragaman yang dimiliki negara Indonesia, pasti didapati dinamika masyarakat yang menyebabkan suatu permasalahan hingga perpecahan. Banyak terjadi pasang surut perjalanan bangsa Indonesia yang dulu hingga menjadikan bangsa Indonesia era ini. Terjadi berbagai peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi adanya perubahan demokrasi, mulai dari awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi, hingga saat ini. Peristiwa dan kerusuhan yang terjadi membuat keberadaan hak asasi manusia hilang. Banyak terjadi kerusuhan, tidak adanya rasa aman bagi rakyat, hingga penyelewengan kekuasaan berupa kekerasan kerap terjadi pada masa itu. Tapi dibalik kelamnya Indonesia terhadap nilai hak asasi manusia di masa itu membawa pengaruh besar hingga saat ini, yaitu masyarakat telah mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Meskipun perkembangan penegakan hak asasi manusia sudah terbilang cukup pesat, tapi masih saja ada unsur masyarakat yang memang masih merampas hak manusia lainnya. Dari artikel ini, penulis akan menyajikan suatu kajian tentang awal mula suatu peristiwa kelam Indonesia terjadi yang membawa dampak besar bagi penegakan keadilan hak asasi manusia di Indonesia saat ini.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu terjadi kerusuhan besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan pada ribuan toko, gedung serta rumah khususnya warga etnis Tionghoa di beberapa kota yang ada di Indonesia hancur lebur di habisi massa. Selain itu, terjadinya kekerasan seksual terhadap puluhan wanita Tionghoa menjadi refleksi dari penegakan HAM di Indonesia saat ini. Dari latar belakang yang telah

disebutkan menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dibahas dan dikaji dalam makalah ini, diantaranya:

1. Apa yang menjadi awal terjadinya Kerusuhan Mei 1998?
2. Bagaimana penyelesaian atas Kerusuhan Mei 1998?
3. Bagaimana penegakan HAM di tahun 2022?

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hak Asasi Manusia (*Human Right*)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia (Ashri, 2018). Hak ini dinyatakan sebagai hak yang *universal* karena hak dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, usia, warna kulit, etnis, budaya maupun agama atau keyakinannya. Dan dimaksud *melekat* pada kodrat kelahirannya adalah hak memang dimiliki manusia sejak lahir dan bukan merupakan pemberian dari kekuasaan maupun pihak manapun.

2.2 Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pemicu atau awal mula terjadinya kerusuhan adalah dampak besar dari krisis keuangan Asia yang terjadi sejak tahun 1997 yang berujung pada aksi demonstrasi mahasiswa. Namun aksi tersebut mengakibatkan terjadinya tragedi Trisaksi yang menewaskan 4 orang mahasiswa. Tragedi yang terjadi menyebabkan terjadinya rangkaian kerusuhan di sejumlah wilayah di Indonesia yang mengakibatkan berbagai kerusakan dan pembakaran bangunan hingga kekerasan seksual terhadap wanita Tionghoa. Dikutip dari halaman KOMPAS.com, kerusuhan ini mengakibatkan sebanyak 499 orang tewas, lebih dari 4000 gedung hancur dan terbakar, serta

kerugian fisik sebesar Rp 2,5 triliun yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia (Adryamarthanino, Kronologi Kerusuhan Mei 1998, 2021).

2.3 Krisis Keuangan Asia

Krisis keuangan Asia terjadi pertama kali karena devaluasi Thai Bath di pertengahan tahun 1997, yang kemudian memicu jatuhnya nilai mata uang dan pasar modal negara-negara tetangga, seperti Korea, Indonesia, Philipina, dan Malaysia. Keterpurukan finansial yang parah membuat negara-negara tersebut meminta bantuan kepada beberapa lembaga internasional seperti ABD, IMF, dan *World Bank*. Walaupun berbagai kebijakan ekonomi telah diterapkan, akan tetapi masih belum menunjukkan hasil penyelesaian yang diharapkan. Terpuruknya perekonomian Asia berdampak pada Russia, Eropa Timur, dan Amerika latin, yang menimbulkan dugaan akan terjadi krisis global (Mahmudy, 2020).

2.4 Tragedi Trisakti

Tragedi Trisakti adalah suatu peristiwa penembakan mahasiswa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 pada saat diadakannya aksi demonstrasi yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan dampak krisis keuangan Asia yang benar-benar menyerang semua unsur golongan masyarakat Indonesia. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisaksi dan puluhan lainnya luka-luka. (Adryamarthanino, Tragedi Trisakti: Latar Belakang, Kronologi, dan Korban Penembakan, 2021)

2.5 Penegakan HAM di Era Reformasi

Setelah berubahnya era dari orde Baru ke dalam era Reformasi, penegakan HAM menjadi suatu agenda utama bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Kelamnya masa lalu bangsa Indonesia di masa sebelum reformasi menuntut kesadaran masyarakat untuk mendorong adanya upaya perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM. Walau memang benar dengan seiringnya gerakan demokrasi di era reformasi ini, namun masih saja ditemui pelanggaran-pelanggaran HAM. Selain hukum-hukum yang mengikat,

kesadaran masyarakat dan juga aparat hukum menjadi tolak ukur penegakan HAM di Indonesia (Safa'af, 2014).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Awal terjadinya Kerusuhan Mei 1998

Sebagai negara yang memiliki masyarakat yang majemuk, ada beberapa tingkatan yang terbentuk di era sebelum kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Masyarakat Indonesia pada masa itu terbagi menjadi beberapa golongan yaitu, golongan Eropa, Tionghoa, dan Pribumi. Golongan Eropa menjadi golongan tertinggi yang kebanyakan terdiri dari penguasa yang membawahi golongan pribumi. Golongan Tionghoa menjadi golongan kelas menengah, mereka disebut sebagai golongan etnis penguasa perekonomian karena kebanyakan etnis Tionghoa berprofesi sebagai pedagang dan pemilik usaha. Dan yang terakhir adalah golongan pribumi yang menjadi golongan terendah di negaranya sendiri pada masa itu (Ode, 2012).

Bisa dilihat dari beberapa golongan yang ada menjadi pemicu utama terciptanya diskriminasi di masa itu. Kesenjangan ini semakin bertambah buruk ketika masa pemerintahan Soeharto yang mana terjadi kesenjangan yang tidak merata antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan dari segi sosial dan ekonomi terjadi dimana pihak kaya menjadi semakin berkuasa dan semena-mena dalam segala aspek, sedangkan di sisi lain pihak miskin menjadi semakin tertindas (Nurmalaningrum, 2018). Selain itu, banyak keterbelakangan identitas Indonesia terjadi di masa Soeharto, yang mana masyarakat tidak diberi kebebasan berpendapat, minoritasnya penegakan HAM, hingga diskriminasi sepihak kepada etnis Tionghoa yang karena menjadi etnis yang selalu unggul dalam segi perekonomiannya. (Santoso, Ratnasari, & Iriyanti, 2021)

Selain banyaknya keterbelakangan pada masa pemerintahan Soeharto terjadi banyak peristiwa kerusuhan. Salah satunya adalah peristiwa kerusuhan Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu sejarah terkelam bagi masyarakat

Indonesia. Penyebab kerusuhan ini diawali oleh adanya Krisis Keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997, yang mana mata nilai rupiah berubah pesat, yang sebelumnya berada pada kisaran Rp 2.600,- mencapai kisaran Rp 14.900,- per dolarnya. Karena krisis moneter yang terjadi, menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, bertambahnya angka pengangguran, dan kepercayaan terhadap presiden Soeharto menjadi goyah, hingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya Tragedi Trisakti. Aksi ini berujung pada Tragedi Trisakti yang juga turut menjadi pemicu terjadinya kerusuhan Mei 1998. (Penyebab Kerusuhan Mei 1998, Sejarah Kelam Pelanggaran HAM di Indonesia, 2022)

3.2 Penyelesaian atas Kerusuhan Mei 1998

Setelah terjadinya kasus kerusuhan Mei 1998, terbentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menyelidiki kasus peristiwa kerusuhan ini. Berdasarkan pada buku Seri Dokumen Kunci Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terbentuk suatu pernyataan sikap masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 16 Juni 1998 sampai dengan 15 Juli 1998 didukung dan ditandatangani oleh 4.000 orang. Tuntutan yang tertera dalam pernyataan tersebut berisi:

- a. Mengakui kegagalannya dalam mewujudkan rasa aman untuk seluruh warga negara.
- b. Membentuk tim penyelidik independen yang terdiri KOMNAS HAM, LSM, Tim Relawan dan saksi/korban di tempat kejadian, untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut diatas.
- c. Menuntut dan menindak tegas para pelaku dan perencananya melalui proses hukum.
- d. Mendukung usaha Tim Relawan dalam menolong dan merehabilitasi korban.
- e. Menjamin bahwa peristiwa semacam itu tidak akan terulang lagi.

Dari tuntutan di atas, keluarlah pernyataan presiden RI Indonesia pada saat itu BJ. Habibie pada tanggal 15 Juli 1998 “... *bahwa pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi*

tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia. ...” (Tim Relawan untuk Kemanusiaan, 1999).

Dari pernyataan yang telah diutarakan pada tahun 1998 silam, hingga sekarang kabar dari penyelesaian kasus ini masih belum terselesaikan. Walau sudah ada hukum yang dikeluarkan di Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masih saja penuntasan kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti melalui jalur pengadilan. Hingga saat ini, keadilan ini masih menunggu bagaimana penuntasan kasus ini akan terselesaikan (Purbolaksono, 2021).

3.3 Penegakan HAM di Tahun 2022

Di umur Indonesia yang ke-77 ini perkembangan Hak Asasi Manusia masih saja dipenuhi dengan urgensi-urgensi yang memicu pelanggaran terhadapnya. Dikutip dari halaman nasional.kompas.com, baru-baru ini terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga (Harruma, 2022). Seiring berjalan dan berkembangnya waktu, penegakan HAM harus tetap dipertahankan. Memang sebagai masyarakat diperlukan adanya kesadaran yang kuat akan penghormatan hak asasi sesama manusia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kita tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah kelam berupa peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang mengakibatkan banyaknya kerusakan secara materiil dan mental bangsa Indonesia khususnya etnis Tionghoa. Kasus inilah yang menjadi titik awal Reformasi hingga munculnya penegakan hukum HAM di Indonesia. Walau benar jika sampai saat ini kasus tersebut masih menjadi luka lama bangsa Indonesia, tetapi penegakan HAM tetap wajib dipertahankan. Ancaman-ancaman yang ada mengindikasikan bahwa urgensi bagi pertahanan masyarakat Indonesia, seharusnya tetap kita cegah dengan terus mengembangkan rasa tinggi akan kewajiban menegakkan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V. (2021, November 15). *Kronologi Kerusuhan Mei 1998*. Retrieved from KOMPAS.com:
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/15/150000579/kronologi-kerusuhan-mei-1998?page=all>
- Adryamarthanino, V. (2021, Juli 7). *Tragedi Trisakti: Latar Belakang, Kronologi, dan Korban Penembakan*. Retrieved from KOMPAS.com:
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/07/080000279/tragedi-trisakti-latar-belakang-kronologi-dan-korban-penembakan?page=all>
- Ashri, M. (2018). *HAK ASASI MANUSIA Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Harruma, I. (2022, Februari 22). *Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia pada 2020-2022*. Retrieved from KOMPAS.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00300051/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-pada-2020-2022?page=all>
- Mahmudy, M. (2020). SETAHUN KRISIS ASIA : BEBERAPA PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI KRISIS TERSEBUT. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 184-201.
- Nurmalaningrum, R. W. (2018, Desember 4). Lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. *INA-Rxiv*. doi:10.31227/osf.io/hn87j
- Ode, M. L. (2012). *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Penyebab Kerusuhan Mei 1998, Sejarah Kelam Pelanggaran HAM di Indonesia*. (2022, Mei 12). Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penyebab-kerusuhan-mei-1998-sejarah-kelam-pelanggaran-ham-di-indonesia-1y3gjrMMBpA/full>
- Purbolaksono, A. (2021, Mei 31). *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Kerusuhan 1998 yang Semakin Terlupakan*. Retrieved from The Indonesian Institute:
<https://www.theindonesianinstitute.com/penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-kerusuhan-1998-yang-semakin-terlupakan/>
- Safa'af, M. A. (2014). *HAM DI ERA REFORMASI. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Santoso, A., Ratnasari, S. D., & Iriyanti, S. (2021). Dampak Kerusuhan Mei 1998 terhadap Perekonomian Masyarakat Etnis Tionghoa di Surakarta. Retrieved from <https://repository.stkippacitan.ac.id/>

Tim Relawan untuk Kemanusiaan. (1999). *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.